



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : RIDWAN ADAM MUHAMAD NOOR
- Jabatan** : KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
- NHK** : 870486

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **870.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 126 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **168.000.000**

- MOBIL, DAIHATSU XENIA LI Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000
- MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
- MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOTOR, SUZUKI SATRIA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOBIL, TOYOTA COROLLA KE30 Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **48.600.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **57.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.143.600.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.143.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.